

**POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK DALAM PENETAPAN CALON
ANGGOTA LEGISLATIF (STUDI KASUS PARTAI SOLIDARITAS
INDONESIA DI KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)**

Julia Kristin Rona Soba

NPP. 30.1141

Asdaf Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : juliakristinronasoba@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dewi Safitri, SH, MH

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP) : Recruitment carried out by political parties is a manifestation of a democratic country. In writing this thesis, the discussion discussed by the researcher was about political recruitment carried out by the Indonesian Solidarity Party of Ende Regency in recruiting Legislative Candidates in 2019. **The purpose** of writing this thesis is to find out the recruitment mechanism process carried out by the Indonesian Solidarity Party of Ende Regency, to find out the supporting and inhibiting factors in the recruitment carried out, and to find efforts so that the obstacles that occur can be overcome by the Indonesian Solidarity Party of Ende Regency. **The research method** used is a descriptive qualitative method, the results of which will be described in detail. In writing this thesis, the theory used is the theory of Michael Rush and Philip Althoff which divides two recruitment patterns, namely open recruitment patterns, and closed recruitment patterns. **The results of the research** that has been conducted found that the success of the Indonesian Solidarity Party as a new party to get 3 seats at the Ende Regency DPRD level is because the recruitment pattern carried out is very open and transparent where the process uses electronic media, so that those selected as candidates also have promising qualities. The stages carried out are very clear in accordance with the rules of political parties. **Conclusion:** inhibiting factor is that candidates find it difficult to adjust to the use of increasingly sophisticated information technology.

Keywords: DPRD Candidates, Recruitment Patterns, Political Party Rules

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik merupakan wujud dari sebuah negara yang berdemokrasi. Dalam penulisan skripsi ini pembahasan yang dibahas oleh peneliti adalah tentang Rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ende dalam merekrut Calon Anggota Legislatif tahun 2019. **Tujuan** dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ende, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam rekrutmen yang dilakukan, dan mencari upaya agar hambatan yang terjadi dapat diatasi oleh Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ende. **Metode** penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yang hasil pembahasannya akan dideskripsikan secara rinci. Dalam penulisan skripsi ini teori yang digunakan adalah teori Michael Rush dan Philip Althoff yang membagi dua pola rekrutmen yaitu pola rekrutmen terbuka, dan pola rekrutmen tertutup. **Hasil** dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa keberhasilan Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai baru untuk mendapatkan 3 kursi di tingkat DPRD Kabupaten Ende karena pola rekrutmen yang dilakukan sangat terbuka dan transparan dimana prosesnya menggunakan media elektronik, sehingga yang terpilih menjadi calon juga memiliki kualitas yang menjanjikan. Tahapan yang dilakukan sangat jelas sesuai dengan aturan Partai Politik. **Kesimpulan :** faktor penghambat adalah para calon kesusahan untuk menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi informasi yang semakin canggih, dan ada beberapa tahapan rekrutmen yang belum berjalan maksimal.

Kata Kunci : Calon Anggota DPRD, Pola Rekrutmen, Aturan Partai Politik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi pemilihan umum adalah salah satu bentuk bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi. Pemilu merupakan jalan yang telah diambil bangsa ini dalam melakukan sirkulasi pemerintahan.¹ Dimana rakyat datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan kuasa yang dimilikinya kepada orang yang dipercaya untuk duduk dalam jabatan politik dan pemerintahan. Rakyat dituntut untuk memilih wakilnya yang telah diusung oleh kelompok partai politik untuk ambil bagian sebagai calon kepala daerah atau anggota legislatif dalam pemilihan umum. Melihat pada kenyataan yang ada saat ini hampir semua partai politik di Indonesia terjebak dalam lingkaran oligarki dan dinasti politik. Pengamat politik Ujang Komarudin dalam Kompas.com menyatakan bahwa tidak ada satu pun partai yang tak melakukan oligarki. Oligarki

¹ Dr. Muhadam Labolo, Teguh Ilham, Partai politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2S015), h. 107

ditubuh partai politik merupakan fenomena umum yang sudah lama terjadi, dan belakangan ini makin tumbuh subur.² Kenyataan ini menunjukkan hampir semua partai tidak menjalankan proses kaderisasi, rekrutmen, dan demokratisasi dengan efektif. Pada kenyataannya, sejumlah jabatan tinggi di partai politik Indonesia memang diduduki oleh keluarga dari elite partai yang sama. Mulai dari anak pendiri partai, anak ketua umum, hingga saudara petinggi partai. Partai Solidaritas Indonesia hadir sebagai partai baru dengan membawa semangat anak muda untuk terlibat dalam kegiatan politik hal ini dilihat dari banyaknya aktivis partai solidaritas Indonesia yang berasal dari kalangan muda. Sebagai partai baru dalam pemilu 2019 bukanlah hal mudah bagi PSI untuk menyelam kedalam samudera politik Indonesia. Perolehan suara yang masih kurang dari harapan dalam pemilu 2019 dimana PSI hanya mampu 2.650.361 suara diseluruh Indonesia atau sekitar 1,85% dari jumlah keseluruhan suara sah. Kejadian yang dialami oleh PSI di beberapa wilayah Indonesia berbeda halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Ende. PSI mampu untuk memperoleh tiga kursi dalam pemilihan anggota legislative DPRD kabupaten Ende. Hal ini membuktikan bahwa PSI adalah salah satu partai yang diakui di Kabupaten Ende. Ini juga menunjukkan bahwa PSI di Kabupaten Ende memanfaatkan kekuatan anak muda dalam memperoleh suara di Pemilihan legislatif tingkat Kabupaten Ende pada tahun 2019. Berdasarkan hal diatas maka peneliti ingin melihat bagaimana pola rekrutmen PSI di Kabupaten Ende Provinsi NTT.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan dengan pola rekrutmen dalam 3 tahun terakhir dan kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Melihat pada kenyataan yang ada saat ini hampir semua partai politik di Indonesia terjebak dalam lingkaran oligarki dan dinasti politik. Kenyataan ini menunjukkan hampir semua partai tidak menjalankan proses kaderisasi, rekrutmen, dan demokratisasi dengan efektif. Pada kenyataannya, sejumlah jabatan tinggi di partai politik Indonesia memang diduduki oleh keluarga dari elite partai yang sama. Mulai dari anak pendiri partai, anak ketua umum, hingga saudara petinggi partai.
- 2) Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 yang membawa Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai baru hanya mampu meraih suara 1,85 % dari total jumlah keseluruhan suara sehingga tidak mampu membawa salah satu wakil PSI untuk berada di senayan
- 3) Kondisi kekalahan PSI secara nasional justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur karena mampu untuk meraih 3 kursi dalam pemilu pertamanya mengalahkan partai-partai besar lainnya yang sudah berkabra di Kabupaten Ende sejak lama seperti Demokrat, PKS, dan PAN.

² Kompas.com “ Parpol dalam pusaran Oligarki : Anak, adik, hingga keponakan masuk jadi elite partai” artikel ini diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/22/05440041/parpol-dalam-pusaran-oligarki--anak-adik-hingga-keponakan-masuk-jadi-elite> pada tanggal 28 Agustus 2022

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu dalam konteks pola rekrutmen partai politik dalam penetapan calon anggota legislatif. Penelitian Ilham Ansari dan Dina Fadyah berjudul Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus : Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kota Bekasi dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif Periode 2014-2019) dimana hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan pola rekrutmen yang digunakan oleh partai politik PAN dengan partai politik lain yang masih sangat bergantung kepada keputusan pimpinan pusat. Dalam proses penetapan calon, DPP hanya sebagai dewan pertimbangan sementara itu yang memiliki peranan besar adalah Pimpinan partai di tingkat daerah seperti DPW, DPD, DPC, dan ranting. PAN memiliki dua cara dalam memilih calon kader yang akan maju dalam proses pemilihan, yaitu memilih calon yang sudah dikenal oleh masyarakat dan putra daerah. (Ilham Ansari dan Dina Fadyah, 2019). Selanjutnya penelitian Azhar Yusriadi yang berjudul Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Penetapan Calon Legislatif 2014 oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bulukumba). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pertimbangan yang diambil oleh DPC Partai Demokrat untuk menetapkan caleg dan data yang diperoleh dari berbagai informan maka dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen DPC Partai Demokrat dalam penetapan caleg untuk pemilu legislative tahun 2014 di Kabupaten Bulukumba bersifat tertutup. (Azhar Yusriadi, 2014). Penelitian Dede Sibariang dkk yang berjudul Pola Rekrutmen PDIP, Nasdem dan PSI Dalam Pemilihan Caleg DPRD II Kota Denpasar Hasil Penelitian yang ditemukan bahwa setiap partai politik memiliki perbedaan dalam arah rekrutmen, PDIP memiliki rekrutmen yang mengarah pada Partisan, Nasdem mengarah kepada Meritokrasi, sedangkan PSI mengarah pada kelangsungan hidup partai dan tidak terpengaruh pada pihak sebelumnya. (Dede Sibariang, Ketut Putra Erawan, Muhammad Ali Azhar, 2019). Penelitian Hendri Wibowo dkk yang berjudul Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh PDIP di Kota Semarang sesuai dengan peraturan partai yang telah dibuat dalam surat Ketetapan Nomor 061/TAP/DPP/III/2013. (Hendri Ariwibowo, Budi Setyono, Rina Martini, 2014)

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dimana peneliti lebih memfokuskan untuk melihat pola rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia sehingga Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu untuk meraih 3 kursi dalam pemilihan Umum pertamanya ditengah kekalahan yang dialami Partai Solidaritas Indonesia secara nasional. Selain itu teori rekrutmen yang peneliti gunakan juga berbeda dengan semua peneliti terdahulu dimana peneliti menggunakan teori pola rekrutmen terbuka dan tertutup dari Michael Rush dan Philip Althoff. Dengan menggunakan menggunakan 5 indikator dalam pola terbuka yaitu : Penyediaan, Agensi, Kriteria, Kontrol , dan Tuntutan dan pola tertutup dilihat dari kedekatan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pola rekrutmen yang dilakukan partai Solidaritas Indonesia dalam penetapan calon anggota legislatif di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, beserta faktor penghambat dan pendukung dalam perekrutan calon anggota legislatif oleh Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Ende Provinsi NTT.

II. METODE

Peneliti menggunakan Penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan studi kasus (*case study*) dalam menyajikan dan menganalisis data yang hasilnya lebih menekankan pada pemahaman dan fakta yang terjadi di lapangan dalam hal ini kantor Sekretariat DPD PSI kabupaten Ende Provinsi NTT. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan 13 (tiga belas) orang informan. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Pola Rekrutmen Partai Politik yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan teori pola rekrutmen oleh Michael Rush dan Philip Althoff yaitu pola rekrutmen terbuka Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam subbab berikut :

a) Penyediaan Bakal Calon Anggota Legislatif

Dalam tahapan penyediaan ada beberapa tahapan yang dilalui oleh para bacaleg yaitu : tahapan pemberkasan, tahapan uji solidaritas, tahapan juri rakyat, tahapan wawancara panelis, dan tahapan poling anggota. Dalam tahapan pemberkasan PSI dilakukan secara online melalui website PSI yaitu <https://psi.id/daftar-bacaleg-psi/> . sebanyak 97 peserta dinyatakan lulus dalam tahapan pemberkasan. Pada tahapan kedua yaitu uji solidaritas para bacaleg diperkenankan untuk mempresentasikan diri mereka yang lulus dalam tahapan ini adalah sebanyak 80 bacaleg, tahapan juri rakyat yang lulus adanya sebanyak

b) Agensi yang menyediakan bakal calon anggota legislatif

Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai baru dalam kancah politik tahun 2019, dalam melakukan perekrutmen mencari calon anggota legislatif dari berbagai sumber yang ada. Hal ini dibuktikan dengan Partai Solidaritas Indonesia walau masih baru namun memiliki jaringan sampai ke struktur pemerintahan terbawah. Bila Dewan Pimpinan Daerah merupakan kepengurusan yang berada di tingkat Kabupaten/Kota maka di tingkat Kecamatan sendiri Partai Solidaritas Indonesia memiliki Dewan Pimpinan Cabang, kemudian di tingkat Desa diperkuat lagi dengan pengurus Ranting Partai. Dalam AD/ART PSI Bab XVII Tentang Organisasi Sayap partai diatur dengan jelas bahwa PSI bisa menggunakan organisasi sayap partai namun kenyataannya PSI tidak mempunyai organisasi sayap partai.

c) Kriteria Rekrutmen

Ada 3 (tiga) hal penting yang menjadi kriteria rekrutmen PSI Kabupaten Ende yaitu diantaranya adalah :

1. Usia

Sesuai dengan yang diatur dalam UU Pemilu Tahun 2017 pasal 240 dijelaskan bahwa usia minimal seseorang yang ingin mendaftar sebagai calon anggota legislatif adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

2. Popularitas

Popularitas merupakan faktor yang berhubungan antara pengaruh status sosial dan ekonomi dimana orang tersebut berasal. Di dalam Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ende, dalam melakukan perekrutan calon anggota DPRD baik dari kader maupun simpatisan, mereka tidak semuanya calon anggota DPRD yang berasal dari status ekonomi dan latar belakang sosial yang baik untuk mendapatkan suara.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Dilihat dari rekapan calon bakal calon Anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia semuanya memenuhi syarat yaitu pendidikan terakhir minimal adalah ijazah SMA.

d) Kontrol Rekrutmen Politik dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif

Kontrol rekrutmen politik adalah suatu peran yang dilaksanakan oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia dalam pengawasan demi kelancaran dalam melakukan rekrutmen calon Anggota DPRD. Adapun kontrol yang dilakukan dari internal partai yang merupakan pengurus dan juga anggota aktif dalam Partai Solidaritas Indonesia, yang rekrutmennya dikontrol dengan AD/ART Partai. Kontrol yang dilakukan adalah dengan memperhatikan setiap pengurus dan juga anggota dari Partai Solidaritas Indonesia yang aktif dalam organisasi.

e) Tuntutan

Adapun *Output* adalah hasil yang didapatkan dari tuntutan maupun dukungan yang diberikan oleh masyarakat dalam pencalonan seseorang sebagai anggota DPRD, tentunya sangat dibutuhkan kemampuan akseptabilitas yang nantinya sangat diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Akseptabilitas ini tentunya tidak hanya dilakukan pada saat menjadi calon saja, akan tetapi selama menjabat hal ini akan sangat dibutuhkan sebab kembali ke tugas awal DPRD, yaitu menjadi wakil rakyat dan penyambung lidah rakyat yang diwakilinya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota DPRD terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia Bapak Imanuel Minggu bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Ende mengatakan bahwa : tuntutan yang dipenuhi adalah dengan menjalankan tugas dan tanggung jawan sebagai mana mestinya sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan hal ini dibuktikan dengan sebuah laporan yang wajib disampaikan setiap tahunnya yang berisi program kerja yang sudah dilaksanakan selama menjabat

f) Kedekatan

Dalam rekrutmen calon anggota legislatif tentunya tidak terlepas dari faktor kedekatan. Namun dalam pelaksanaan rekrutmen Bacaleg PSI faktor kedekatan justru sangat tidak

berpengaruh dalam perekrutmen karena proses yang dilalui sangatlah ketat. Hal inilah yang membedakan pola rekrutmen PSI dengan partai lainnya. Orang yang memiliki kedekatan bisa saja disuruh mendaftar menjadi calon anggota DPRD dari PSI namun tidak berarti dia menjadi calon tetap dari PSI, hal ini dikarenakan pada tahap Uji Panelis orang-orang yang melakukan wawancara adalah orang dari luar yang tidak memiliki hubungan dengan proses pemilihan Legislatif di Kabupaten Ende sehingga penjurian yang dilakukan benar-benar murni tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

pola rekrutmen yang dilakukan oleh PSI di kabupaten ende menggunakan pola rekrutmen terbuka dalam tahapan perekrutan PSI menggunakan media elektronik untuk tahapan mendaftar. yaitu melalui website PSI <https://psi.id/daftar-bacaleg-psi/> Biodata diri maupun berkas terkait akan secara langsung dimasukan melalui website. Dalam pemilu pertamanya ini ada 97 orang yang mendaftar. PSI juga melibatkan masyarakat dalam merekrut calon anggota legislatif hal ini dibuktikan dengan adanya tahapan juri rakyat. Dalam tahapan wawancara panelis PSI Kabupaten Ende melibatkan pihak dari luar kabupaten untuk mewawancarai para bacaleg dengan kompetensi yang sudah mereka miliki. Akhirnya didapatkanlah 30 kandidat terbaik yang menjadi calon anggota legislatif PSI. PSI sendiri tidak memiliki agensi atau organisasi sayap partai meskipun hal ini sudah dijelaskan dalam AD/ART PSI. kriteria yang ditetapkan oleh psi sendiri terdiri atas 3 yaitu : usia, popularitas dan pendidikan. Kontrol serta tuntutan yang diberikan partai adalah berkaitan dengan kerja dari para anggota DPRD sendiri dan diwujudkan dalam bentuk sebuah laporan kerja yang dilaporkan setiap tahunnya kepada partai.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan faktor-faktor penghambat perekrutan adalah faktor penghambat diantaranya adalah : walaupun di beberapa daerah sudah banyak yang merespon baik adanya partai politik yang ingin merekrut namun masih ada beberapa masyarakat yang memegang percaya akan stigma bahwa politik itu ajang untuk korupsi sehingga mereka menolak kedatangan Partai Politik ditengah tengah mereka. Faktor penghambat selanjutnya tidak adanya agensi yang dimiliki oleh PSI dan penggunaan media elektronik secara wajib yang membuat kesulitan para calon anggota legislatif.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola yang dilakukan oleh PSI Kabupaten Ende dalam menetapkan calon anggota legislatif adalah pola rekrutmen terbuka. Namun ada 1 indikator yang belum dipenuhi PSI dalam melakukan rekrutmen terbuka yaitu tidak adanya agensi atau organisasi sayap partai yang dapat menjadi agensi awal bagi para bacaleg yang ingin mendaftar
2. Faktor pendukung dalam rekrutmen yang dilakukan oleh PSI adalah penggunaan media elektronik sehingga menjadi efektif dan cepat sedangkan faktor penghambatnya sendiri adalah kurangnya kesadaran politik masyarakat sehingga terjadi banyak penolakan saat melakukan survey, dan beberapa bacaleg yang kesulitan mengakses teknologi karena keterbatasan pengetahuan

3. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dan memberikan pelatihan teknologi kepada bacaleg.

Keterbatasan Penelitian : penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. penelitian ini sendiri hanya dilakukan di Sekretariat DPD PSI Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pola rekrutmen partai politik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria dan keluarga khususnya kedua orang tua yang senantiasa selalu mendoakan, terima kasih kepada ke tiga saudara kandung saya juga yang sudah selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga besar DPD PSI Kabupaten Ende Provinsi NTT yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor sekretariat DPD PSI Kabupaten Ende.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ariwibowo, H., Setyono, B., & Martini, R. (2013). POLA REKRUTMEN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MENJELANG PEMILU 2014 DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1-13.

sibagariang, D., Erawan, K. P., & Azhar, M. A. (2019). POLA REKRUTMEN PDIP, NASDEM, DAN PSI DALAM PEMILIHAN CALEG DPRD DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Nawala Politika*, 1-8.

yusriadi, A. (2014). *POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK (STUDI PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN BULUKUMBA)*. GOWA: PERPUNAS .

Ansari, I., & Fadyah, D. (2019). Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus : Dewan Pimpinan Cabang Partai Amananat Nasional Kota Bekasi dalam Menetapkan Anggota Legislatif Perode 2014-2019). *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA' 45 Jakarta*, 1-19 .

Farisa, F. C. (2021, Desember 22). *Kompas*. Retrieved Agustus 28, 2022, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/22/05440041/parpol-dalam-pusaran-oligarki--anak-adik-hingga-keponakan-masuk-jadi-elite>





